



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH PADA DESA PULAU ARO KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Registha Prayumara

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : Registhaprayumara1108@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah. Teknik penarikan sampel untuk perangkat desa menggunakan teknik Sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang berjumlah 9 orang, dan untuk Unsur masyarakat berjumlah berjumlah 43 orang, menggunakan teknik Simple Random Sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Hasil sebaran kuesioner yang telah dilakukan mengenai Peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Era Otonomi Daerah pada Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 2,55 berarti berada pada interval Kurang Berperan. Yang artinya pemerintah desa Kurang Berperan dalam pemberdayaan masyarakat pada Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan dari 5 indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh indikatornya berada pada interval Kurang Berperan.

Keywords: Evaluasi, Pelayanan Publik

Abstract

This research was conducted in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how much the role of village government in community empowerment in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is What is the role of the village government in community empowerment in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District. The sampling technique for village officials used the saturated sampling technique, where all the population was sampled, totaling 9 people, and for community elements numbering 43 people, using the Simple Random Sampling technique, namely taking sample members from the population carried out randomly without regard to strata exist in that population. The results of the distribution of questionnaires that have been carried out regarding the role of the village government in community empowerment in the

Era of Regional Autonomy in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi District which produce an average value of 2.55 means that they are in the Interdependent Interval. Which means that the village government has less role in community empowerment in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. This is because of the 5 indicators used in this study, all of the indicators are in the Less Participating interval.

Keywords: Evaluation, Public Services

1. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Sedangkan fungsi desa itu sendiri adalah Dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan hinterland atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari hewan. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja.

Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dengan kata lain membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, kemudian diperlukan langkah-langkah positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Ketiga, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah tambah lemah, karena kurang berdaya menghadapi yang kuat.

Kepala Desa sebagai aparatur pemerintah memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, sebab disamping sebagai abdi negara dalam rangka menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan, juga sebagai abdi masyarakat dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam RPMJDes Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat banyak program pemberdayaan yaitu :

1. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan,
2. Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
3. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan
4. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani
5. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin
6. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Nelayan
7. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak
8. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda
9. Pelatihan Teknologi Tepat Guna

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah merupakan salah satu alternatif mengurangi angka kemiskinan. Dari banyak nya pemberdayaan diatas untuk alternatif mengurangi angka kemiskinan, memang dari RPMJDes banyak program pemberdayaan yang ada di Desa Pulau Aro, namun penyelenggaraan program pemberdayaan di desa pulau aro belum optimal, berdasarkan hasil observasi dilapangan menemukan fenomena gejala sebagai berikut :

1. Pemerintah desa kurang berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa pulau aro untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat..
2. Terlalu berfokus pada pembinaan pemuda saja, melalui latihan atlit dayung, namun tidak ada nya penyelenggaraan pelatihan untuk masyarakat mengenai Usaha Ekonomi, Pertanian, dan Perdagangan.
3. Desa pulau aro terdapat usaha keripik ubi, namun usaha ini hampir tidak ada peranan pemerintah desa didalamnya, masyarakat mandiri dalam usaha ini, usaha ini dipasarkan pun mandiri tanpa ada campur tangan pemerintah desa, biasanya masyarakat membawa ke pasar atau meletakkan ke warung-warung terdekat. Harusnya pemerintah desa menunjukkan peranannya untuk mengembangkan usaha ini, memperkenalkan atau membantu memasarkan keripik ubi ini ke lingkup yang lebih luas tidak sebatas dibawa kepasar atau warung-warung terdekat, dengan memberikan pembinaan cara-cara memasarkan usahanya, seperti misalnya memasarkan ke mini market, atau di fasilitasi agar bisa di pasarkan secara online. Masyarakat biasa tidak akan mengerti karena mayoritas yang menggeluti usaha ini adalah ibu-ibu yang tidak paham akan hal itu.
4. Dikarenakan tidak adanya peranan pemerintah desa untuk mengembangkan usaha keripik ini, sehingga usaha ini tidak ada perkembangan, hanya begitu-begitu saja, hal ini menyebabkan tidak ada peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif ini, dimana yang menjalani usaha ini hanya orang-orang yang itu-itu saja. Lain halnya apabila usaha ini dikembangkan hingga dikenal masyarakat dengan lingkup yang lebih luas, hal ini dengan sendirinya akan meningkatkan kapasitas kelompok dalam usaha ini. Harusnya ada upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas kelompok usaha, memberi arahan agar masyarakat tertarik membentuk kelompok baru untuk usaha ini mengingat di desa pulau aro terdapat cukup banyak kebun ubi untuk bahan pembuatan usaha keripik ubi ini.
5. Dalam peningkatan usaha kelompok perempuan, selain hanya usaha keripik ubi yang hanya di jalankan oleh sedikit orang, harusnya pemerintah desa bisa melakukan peningkatan usaha kelompok perempuan dengan mengadakan program menjahit untuk kelompok perempuan di Desa Pulau Aro.
6. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani, kelompoknya memang ada tapi tidak aktif, harusnya peran perintah desa ada disini untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani atau setidaknya membuat kelompok tani yang ada di desa pulau aro menjadi aktif.
7. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, hingga saat ini belum ada kelompok perlindungan anak dan perempuan yang berjalan, dan juga tidak adanya perangkat desa atau lembaga desa yang benar-benar fokus untuk Pemerhati dan Perlindungan Anak.
8. Pelatihan Teknologi Tepat Guna, tidak ada pelatihan apapun di desa, padahal di desa pulau aro memiliki lahan persawahan yang cukup banyak, harus nya ada pelatihan teknologi Tepat Guna seperti traktor dan mesin giling padi. Teknologi ini sangat tepat jika digunakan dikembangkan. Dengan memanfaatkan teknologi, para petani tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga untuk mencangkul atau melakukan pemisahan bulir

padi untuk menjadi gabah, dari batang padi secara manual. Jadi selain lebih efektif dan efisien, juga tentu menguntungkan.

9. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda, hanya sekedar penyuluhan untuk pemuda mengenai narkoba.

Berdasarkan permasalahan diatas yang menjelaskan permasalahan mengenai beberapa program pemberdayaan yang ada di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut belum optimal, banyak program pemberdayaan tidak dilaksanakan dengan optimal. Dari masalah yang telah diuraikan tadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Era Otonomi Daerah pada Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

The Liang Gie. (1979, 11) menyatakan bahwa Administrasi adalah ilmu yang mempelajari hal ikhwal “usaha manusia yang secara teratur bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu” disebut ilmu administrasi. Ilmu ini merupakan suatu cabang baru dari pada ilmu sosial. Sebagai pengetahuan modern yang dipelajari secara teratur, ilmu administrasi masih tergolong muda usianya, baru dimulai kira-kira pada permulaan abad ke-20 ini.

Sebagaimana dialami oleh cabang-cabang ilmu sosial lainnya yang baru lahir, ilmu administrasi hingga kini belum mendapat pengakuan dan kedudukan yang kuat, terutama dari para ahli ilmu-ilmu eksakta. Mereka menyatakan suatu pengetahuan dapat diakui sebagai ilmu (pengetahuan) kalau pengetahuan tadi memiliki hukum-hukum, teori-teori atau prinsip-prinsip yang dapat berlaku secara universal, artinya hukum/teori/prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja dengan memberikan hasil yang sama.

Ilmu administrasi tidak bakalan memiliki hukum/teori-teori/prinsip-prinsip yang berlaku demikian karena objek studinya berupa manusia yang mempunyai emosi dan akal pikiran yang mudah berubah karena dipengaruhi oleh ruang lingkup budaya dan waktu di mana manusia tadi berada. Contoh, prinsip-prinsip administrasi, Charles A. Beard, seorang historikus politik Amerika yang terkenal, dalam salah satu karyanya yang dikutip oleh Albert Lepawsky dalam bukunya *Administration* pada tahun 1937 berkata bahwa “Tidak ada sesuatu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern” (Albert Lepawsky dalam Siagian, 1971 : 11)

Pada umumnya pembagian bidang/cabang administrasi dibedakan ke dalam administrasi publik (*public administration*) dan administrasi niaga (*business administration*). Pembagian yang agak berbeda dikemukakan oleh The Liang Gie dan Siagian. The Liang Gie (1979, 12-13) membagi administrasi berdasarkan sifat usaha kerja sama guna mencapai tujuan tertentu

dengan demikian juga ilmu yang mempelajari usaha kerja sama tersebut dapat dibedakan dalam tiga bidang/cabang pokok secara vertikal, yaitu sebagai berikut.

1. Administrasi Kenegaraan (Public Administration)
Usaha kerja sama dalam hal-hal yang mengenai kenegaraan pada umumnya merupakan pemberian pelayanan terhadap segenap kehidupan warga Negara yang terdapat di dalam negara itu. Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pelayanan (services) tersebut mempunyai ciri-ciri yang berikut.
 - a. Kegiatan itu merupakan sesuatu yang lebih urgent dari pada yang diselenggarakan pihak swasta.
 - b. Kegiatan itu mempunyai corak monopoli atau setengah monopoli.
 - c. Kegiatan itu terikat oleh peraturan-peraturan hukum
 - d. Kegiatan itu tak bergantung kepada pertimbangan harga pasar
 - e. Kegiatan itu berlangsung di bawah pengawasan rakyat, terutama dalam negara dengan sistem demokrasi.
2. Administrasi Perusahaan (Business Administration)
Usaha kerja sama dalam hal-hal yang mengenai perusahaan terutama mempunyai sifat pertukaran. Di sini terdapat pertimbangan untung rugi dalam kegiatan menghasilkan atau memberikan sesuatu barang/jasa atas pemberian barang/jasa tersebut ditarik sesuatu sebagai balasannya. Kalau usaha pertukaran itu tidak seimbang maka kerja sama tersebut tidak akan berlangsung lama.
3. Administrasi Kemasyarakatan (Social Administration)
Usaha kerja sama dalam hal-hal yang mengenai kemasyarakatan pada umumnya mempunyai sifat untuk memajukan sesuatu hal bagi sekelompok orang tertentu. Kegiatan-kegiatan yang demikian ini misalnya kita jumpai dalam kelompok-kelompok serikat buruh, perhimpunan sarjana dalam sesuatu bidang ilmu, perkumpulan olahraga tau kesenian, yayasan, koperasi, lembaga fakir miskin dan badan-badan sosial lainnya.

2.2 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen dapat dianggap sebagai suatu proses yang menggerakkan kegiatan dalam administrasi itu sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Oliver Sheldon (dalam The Liang Gie, 1979, 14) mengatakan manajemen sebagai *the process by which the execution of a given purpose is put into operation and supervised* (proses dengan mana pelaksanaan dari suatu tujuan tertentu dijalankan dan diawasi).

Manajemen mempunyai fungsi-fungsi yang berikut.

- a. Perencanaan (*planning*).
- b. Penjurusan (*directing*, termasuk leadership).
- c. Koordinasi (*coordinating*).
- d. Pengendalian (*controlling*).

Fungsi koordinasi dan pengendalian itu pada akhir-akhir ini terutama menimbulkan sekelompok pengetahuan dengan nama Manajemen Administratif (*Administrative Management*). Manajemen administratif merupakan proses yang sangat penting untuk menjamin kesatuan tindakan dan mengusahakan program pengendalian terutama pada instansi, rencana, kebijaksanaan dan usaha pemerintah.

Fungsi koordinasi dan pengendalian itu pada akhir-akhir ini terutama menimbulkan sekelompok pengetahuan dengan nama Manajemen Administratif (*Administrative Management*). Manajemen administratif merupakan proses yang sangat penting untuk menjamin kesatuan tindakan dan mengusahakan program pengendalian terutama pada instansi, rencana, kebijaksanaan dan usaha pemerintah, UN TAA (dalam The Liang Gie, 1979 : 14).

Kepegawaian ini merupakan segi yang berkenaan dengan sumber tenaga manusia (*working force*) yang harus ada pada setiap usaha kerjasama. Penelaahan terhadap unsur ini menimbulkan sekelompok pengetahuan yang dicakup dengan nama Administrasi Kepegawaian (*Personnel Administration*). Administrasi ini pada pokoknya mempelajari segenap proses pemakaian tenaga manusia itu sejak dari penerimaannya (*recruiting*) sampai pemberhentiannya (*retirement*). Termasuk pula di sini adalah Analisis dan Klasifikasi Jabatan (*Job Analysis and Classification*) serta pengembangan tenaga itu melalui latihan-latihan (*training*).

2.3 Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan atau leader memiliki berbagai pengertian. Pemimpin merupakan dampak interaktif dari faktor individu atau pribadi dengan faktor situasi. Menurut Santoso (2009:25) pemimpin merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memberikan komando atau arahan kepada orang-orang yang telah memberikan kepercayaan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan harapan pemberi kepercayaan tersebut akan lebih baik nasibnya dibandingkan dari kepemimpinan sebelumnya.

Sedangkan menurut Wahjosumidjo (1984:12), kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, bawahan dan situasi. Menurut Mulyadi (2010:54) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berperan dengan baik, antara lain:

- a. Yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan pengangkatan atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan.
- b. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuan untuk tumbuh dan berkembang.
- c. Efektivitas kepemimpinan menurut kemahiran untuk “membaca” situasi.
- d. Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan perkembangan.
- e. Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyelesaikan secara berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam pengertian lain kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dari berbagai definisi tersebut, maka kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk bisa mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan tingkah laku orang lain atau kelompok yang berada dalam lingkup masyarakat tertentu sehingga bisa diatur sesuai kemauan atau perintah seorang pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai situasi/keadaan.

2.4 Teori Organisasi

Organisasi merupakan struktur atau wadah di mana usaha kerja sama itu diselenggarakan. James D. Mooney (dalam The Liang Gie, 1979: 14) menyebutnya sebagai bentuk dari pada perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama (*the form of every human association for the attainment of a common purpose*).

Sejalan dengan ini maka proses mengorganisasi (*organizing*) ialah penyusunan struktur dengan membagi-bagi dan menghubungkan-hubungkan orang, wewenang, tugas dan tanggung jawab menjadikesatuan yang selaras. Termasuk pula dalam proses mengorganisasi atau membentuk organisasi ini ialah penentuan tujuan yang hendak dicapai.

Penelaahan terhadap struktur di mana administrasi itu berlangsung menimbulkan sekelompok pengetahuan yang disebut berikut.

- a. Teori organisasi (theory of organization).
- b. Analisis organisasi dan metode (O & M analysis).
- c. Perilaku administratif (administrative behavior).
- d. Hubungan manusia (human relation)

2.5 Teori Peranan

Membahas masalah peranan, maka yang telah diketahui adalah kemampuan seseorang atau lembaga dalam memberikan fungsinya secara maksimal kepada suatu obyek yang menjadi sasaran. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat banyak pengertian peranan, baik oleh para ahli maupun dari berbagai literatur yang dikutip. Peranan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan. Pengertian tersebut dapat diperluas pemaknaannya bahwa peranan adalah suatu penampilan atas tingkah laku tertentu dari seseorang yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan dalam melaksanakan tugas untuk tujuan tertentu.

Menurut Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Selanjutnya Siagian (1983:3) menyatakan bahwa peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses pencapaian tujuan.

Wirutomo (1981 : 99-101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Peranan ditentukan oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Selanjutnya, dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

2.6 Teori Pemberdayaan

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 12 disebutkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang sering kali mematikan kemandirian masyarakat setempat. (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 100).

Pemberdayaan merupakan proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan pada diri semua stakeholders (individu, kelompok,

kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. (Slamet dalam Mardikanto & Soebiato, 2019 : 100).

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Bertolak dari pemahaman pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Mengerjakan artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
2. Akibat artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.
3. Asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya. (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 105)

2.7 Teori Desa

Pengertian Desa adalah sebagai kesatuan wilayah terkecil dalam lingkup wilayah kecamatan di daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa sebagai aparatur pemerintah memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, sebab disamping sebagai abdi negara dalam rangka menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan, juga sebagai abdi masyarakat dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah di bawah pengawasan pemerintah pusat, jenis-jenis pelayanan yang dapat diawasi penyelenggaraannya oleh Kepala Desa adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pengurusan pembuatan KTP, pembuatan akta tanah, pelayanan kesehatan, penyuluhan masyarakat, modal usaha dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi desa pada pasal 2, terdiri dari:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Pelaksana Kewilayahaan
4. Pelaksana Tekni

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012 : 8)

Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2012 : 13). Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan seberapa besar Peranan Pemerintahan Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Pada Desa Pulau Aro ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner yang telah dilakukan mengenai Peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Era Otonomi Daerah pada Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi di dapat :

Indikator Efektifitas Pelayanan Desa Lubuk Terentang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Pemerintah desa berperan dalam menentukan kebutuhan pengembangan untuk masyarakat Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata-rata = 2,61 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Pemerintah desa berperan dalam menentukan kebutuhan pengembangan pada kategori Cukup Berperan yang berada pada skala 2,60 – 3,39. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Pemerintah desa memang Cukup berperan dalam menentukan kebutuhan pengembangan untuk masyarakat, terlihat dengan penyusunan rencana kerja, dilakukan musyawarah yang dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai pemberdayaan untuk masyarakat ini.
2. Pemerintah desa berperan dalam memenuhi kebutuhan pengembangan untuk masyarakat Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata-rata = 2,42 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Pemerintah desa berperan dalam memenuhi kebutuhan pengembangan pada kategori Kurang Berperan yang berada pada skala 1,80 - 2,59. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Pemerintah desa memang Kurang Berperan dalam memenuhi kebutuhan pengembangan, dimana tidak semua pemberdayaan yang telah di rencanakan terlaksana dengan baik.
3. Pemerintah desa berperan dalam pembinaan Pelatihan Pengembangan Usaha untuk pemberdayaan masyarakat Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh rata-rata = 2,55 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Pemerintah desa berperan dalam pembinaan Pelatihan Pengembangan Usaha untuk pemberdayaan pada kategori Kurang Berperan yang berada pada skala 1,80 - 2,59. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Pemerintah desa memang Kurang Berperan dalam pembinaan Pelatihan Pengembangan Usaha untuk pemberdayaan, dimana tidak semua pemberdayaan benar-benar terlaksana dengan baik, pembinaan pemuda saja yang paling terlihat seperti pembinaan atlet pacuan jalur dan sekarang perahu naga (Dragon Boat), harusnya ada juga seperti desa lain yang memberikan latihan menjahit sebagai pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah desa berperan dalam mengkoordinasikan Pelatihan Usaha untuk pemberdayaan masyarakat Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,48 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan pemerintah desa dalam mengkoordinasikan Pelatihan Usaha untuk pemberdayaan masyarakat pada kategori Kurang Berperan yang berada pada skala 1,80 - 2,59. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Kurang

Berperan dalam mengkoordinasikan Pelatihan Usaha untuk pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat tidak merasakan peran pemerintah dalam mengkoordinasi pelatihan usaha untuk pemberdayaan masyarakat ini. harusnya ada juga seperti memberikan latihan menjahit sebagai pemberdayaan masyarakat.

Indikator Pengembangan Kelembagaan Kelompok pemberdayaan di Desa Pulau Aro Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Pemerintah desa berperan untuk memajukan kelompok-kelompok Usaha Ekonomi Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,52 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Pemerintah desa berperan untuk memajukan kelompok-kelompok Usaha pada kategori Kurang Berperan yang berada pada skala 1,80 - 2,59. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Kurang Berperan dalam memajukan kelompok-kelompok Usaha desa, tidak terlihat berperan pemerintah desa dalam yang signifikan untuk kelompok-kelompok masyarakat ini, seperti di desa pulau aro ini ada usaha keripik ubi namun tidak ada peran pemerintah untuk memajukan kelompok usaha ini, juga pada kelompok tani yang juga kurang aktif, tidak ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, serta harusnya untuk kelompok perempuan di laksanakan kegiatan pelatihan menjahit untuk kelompok perempuan ini, agar kelompok perempuan dapat membuat usaha dari kegiatan tersebut.

2. Pemerintah desa berperan dalam menyusun kegiatan-kegiatan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,69 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Pemerintah desa berperan dalam menyusun kegiatan-kegiatan pengembangan kelompok pada kategori Cukup Berperan yang berada pada skala 2,60 – 3,39. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Cukup Berperan dalam menyusun kegiatan-kegiatan pengembangan kelompok, karena masyarakat di beri kesempatan mengusulkan kegiatan pemberdayaan apa yang akan dilaksanakan, kegiatan-kegiatan pemberdayaan disusun melalui musyawarah desa, namun tidak semuanya terlaksana dengan baik.

3. Pemerintah desa berperan mendorong anggota kelompok untuk mengikuti pelatihan untuk pengembangan kelompok usaha di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,53 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Pemerintah desa berperan mendorong anggota kelompok untuk mengikuti pelatihan pada kategori Kurang Berperan yang berada pada skala 1,80 – 2,59. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Kurang Berperan dalam mendorong anggota kelompok untuk mengikuti pelatihan, karena tidak adanya pengembangankelompok-kelompok usaha masyarakat, seperti kelompok usaha keripik ubi, tidak ada apapan yang dilakukan pemerintah desa untuk memajukan atau untuk usaha ini agar lebih berkembang, serta harusnya untuk kelompok perempuan di laksanakan kegiatan pelatihan menjahit untuk kelompok perempuan ini, agar kelompok perempuan dapat membuat usaha dari kegiatan tersebut.

4. Pemerintah desa berperan mendorong anggota kelompok untuk meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha kelompok usaha di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,57 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Pemerintah desa berperan mendorong anggota kelompok untuk meningkatkan keterampilan pada kategori Kurang Berperan yang berada pada skala 1,80 – 2,59.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Kurang Berperan dalam mendorong anggota kelompok untuk meningkatkan keterampilan, karena tidak terlihat adanya peran dalam meningkatkan keterampilan masyarakatnya, seperti harusnya untuk kelompok perempuan dilaksanakan kegiatan pelatihan menjahit untuk kelompok perempuan ini, agar lebih mengasah keterampilan kelompok perempuan dan diharapkan dapat membuat usaha dari kegiatan tersebut.

Indikator Pemupukan Modal Masyarakat di Desa Pulau Aro Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Pemerintah desa berperan membantu dalam bentuk permodalan untuk pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,67 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Pemerintah desa berperan membantu dalam bentuk permodalan untuk pemberdayaan masyarakat pada kategori Cukup Berperan yang berada pada skala 2,60 – 3,39. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Cukup Berperan dalam membantu dalam bentuk permodalan untuk pemberdayaan masyarakat, karena desa pulau aro memiliki BUMDes, UED SP untuk masyarakat yang membutuhkan dana sebagai tambahan permodalan.

2. Pemerintah desa berperan membantu dalam bentuk permodalan untuk pemberdayaan masyarakat yang bersumber diluar dana desa di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,53 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan pemerintah desa membantu dalam bentuk permodalan yang bersumber diluar dana desa pada kategori Kurang Berperan yang berada pada skala 1,80 – 2,59.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Kurang Berperan dalam membantu dalam bentuk permodalan yang bersumber diluar dana desa, karena tidak peran pemerintah dalam permodalan yang bersumber dari luar desa, hanya ada permodalan melalui UED SP saja.

3. Pemerintah desa berperan memfasilitasi dalam bentuk sarana dan prasarana usaha di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,61 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Pemerintah desa berperan memfasilitasi dalam bentuk sarana dan prasarana usaha pada kategori Cukup Berperan yang berada pada skala 2,60 – 3,39. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Cukup Berperan dalam memfasilitasi dalam bentuk sarana dan prasarana usaha, seperti terlihat pada bidang pertanian, pemerintah membuat sumur bor untuk persawahan, namun tidak semua sarana tersedia, harusnya ada disediakan mesin jahit untuk kelompok perempuan untuk pelatihan menjahit.

4. Pemerintah desa berperan dalam membantu anggota untuk mendapatkan modal baik pengetahuan maupun dana untuk pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,55 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Pemerintah desa berperan dalam membantu anggota untuk mendapatkan modal pada kategori Kurang Berperan yang berada pada skala 1,80 – 2,59. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Kurang Berperan dalam membantu anggota untuk mendapatkan modal, karena hanya ada permodalan melalui UED SP saja, tidak ada bentuk bantuan lainnya dari pemerintah desa untuk membantu anggota kelompok yang membutuhkan modal.

Indikator Pengembangan Usaha Produktif di Desa Pulau Aro Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Pemerintah desa berperan dalam permodalan untuk mengembangkan usaha kelompok masyarakat Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,61 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Pemerintah desa berperan dalam permodalan untuk mengembangkan usaha kelompok masyarakat pada kategori Cukup Berperan yang berada pada skala 2,60 – 3,39. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Cukup Berperan dalam dalam permodalan untuk mengembangkan usaha kelompok masyarakat, karena untuk permodalan masyarakat bisa mendapatkan permodalan melalui UED SP yang ada di desa, namun hanya sebatas permodalan dari UED ini dan tidak ada bantuan permodalan yang di upayakan pemerintah desa dari luar.
2. Pemerintah desa berperan dalam menyediakan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan usaha kelompok ekonomi masyarakat Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,44 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Pemerintah desa berperan dalam menyediakan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan usaha kelompok pada kategori Kurang Berperan yang berada pada skala 1,80 – 2,59. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Kurang Berperan dalam menyediakan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan usaha kelompok, dimana tidak ada pemerintah menyediakan pelatihan untuk mengembangkan usaha, padahal di pulau aro terdapat cukup banyak Ubi kayu, namun kebanyakan hanya memuat keripik ubi dan tapai ubi, itupun hanya sebatas perorangan, harusnya ada peran pemerintah dalam memberikan pelatihan semisalnya untuk membuat produk baru, seperti tepug ubi dan produk lainnya yang berbahan dasar ubi.
3. Pemerintah desa berperan memfasilitasi dan sosialisasi untuk mengembangkan usaha kelompok ekonomi masyarakat Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,37 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Pemerintah desa berperan memfasilitasi dan sosialisasi untuk mengembangkan usaha kelompok masyarakat pada kategori Kurang Berperan yang berada pada skala 1,80 – 2,59. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Kurang Berperan memfasilitasi dan sosialisasi untuk mengembangkan usaha kelompok masyarakat, tidak optimalnya sosialisasi dan kurang dalam memfasilitasi untuk masukan-masukan masyarakat ini, sebab seperti bidang pengembangan kelompok perempuan hanya sebatas pengajian saja, harusnya ada disediakan difasilitasi mesin jahit untuk kelompok perempuan agar dapat melaksanakan pelatihan menjahit.
4. Pemerintah Desa Pulau Aro berperan memasarkan hasil usaha kelompok ekonomi masyarakat keluar desa. Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,58 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan pemerintah desa berperan memasarkan hasil usaha kelompok masyarakat keluar desa pada kategori Kurang Berperan yang berada pada skala 1,80 – 2,59. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Kurang Berperan memasarkan hasil usaha kelompok masyarakat keluar desa, karena tidak adaperan desa untuk memasarkan produk usaha dari masyarakat, hanya msyarakat individu dalam memasarkan hasil usahanya, harusnya di berikan pelatihan atau dibantu dipasarkan secara online, melalui media sosial

Indikator Penyediaan Informasi Tepat-Guna yang disediakan pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Pemerintah desa Pulau Aro berperan menyediakan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat.
Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,65 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan pemerintah desa berperan menyediakan setiap informasi pada kategori Cukup Berperan yang berada pada skala 2,60 – 3,39. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Cukup Berperan menyediakan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat, terlihat penyampaian informasi melalui kantor desa, dilakukan melalui musyawarah, rapat kelompok, dicanangkan, maupun melalui mikrifon tempat ibadah.
2. Pemerintah desa berperan mensosialisasikan kepada setiap masyarakat mengenai perkembangan dan memberikan pembinaan Pelatihan teknologi tepat guna untuk masyarakat Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,46 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Pemerintah desa berperan mensosialisasikan kepada setiap masyarakat mengenai perkembangan dan memberikan pembinaan Pelatihan teknologi tepat guna pada kategori Kurang Berperan yang berada pada skala 1,80 – 2,59. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Kurang Berperan dalam mensosialisasikan kepada setiap masyarakat mengenai perkembangan dan memberikan pembinaan Pelatihan teknologi tepat guna, dimana tidak adanya sosialisasi khusus mengenai perkembangan dan tidak ada pelatihan teknologi tepat guna yang dilakukan pemerintah desa Pulau Aro.
3. Pemerintah Desa menjadi wadah bagi para pelaku usaha apabila menemukan kesulitan atau hambatan dalam usaha pemberdayaan yang dilakukan masyarakat Desa Pulau Aro. Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,54 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Desa menjadi wadah bagi para pelaku usaha apabila menemukan kesulitan pada kategori Kurang Berperan yang berada pada skala 1,80 – 2,59. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Kurang Berperan menjadi wadah bagi para pelaku usaha apabila menemukan kesulitan, harusnya pemerintah desa menjadi yang terdepan dalam hal apapun apabila masyarakat memerlukan bantuan atau saat menemukan masalah dalam usahanya.
4. Pemerintah desa berperan dalam setiap program pemberdayaan masyarakat Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil sebaran kuesioner rata-rata = 2,65 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Pemerintah desa berperan dalam setiap program pemberdayaan masyarakat Desa pada kategori Cukup Berperan yang berada pada skala 2,60 – 3,39. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah desa memang Cukup Berperan dalam setiap program pemberdayaan masyarakat Desa, terlihat dengan pemerintah desa melaksanakan pemberdayaan yang telah di musyawarahkan, disaat musyawarah pemerintah menampung seluruh aspirasi program pemberdayaan yang diajukan masyarakat, hanya saja tidak semua pemberdayaan dilaksanakan dengan maksimal.

5. SIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan pemberdayaan masyarakat di Era Otonomi Daerah pada Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 2,55 berarti berada pada interval Kurang Berperan. Serta observasi dilapangan yang menunjukkan memang kurang berperanya pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat ini, Karena pemberdayaan yang dilakukan tidak benar-benar terlihat manfaatnya untuk masyarakat, dan tidak terlihat peran pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat sedikit meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengurangi pengangguran.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda Budi Pramono dan Ibunda Yuni Hartini yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat m memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan Selaku dosen pembimbing I, Bapak Sahri Muharram, S.Sos, M.Si Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, John. 1997. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*. Alih Bahasa: Agus Dharma Jakarta: PT. Pustaka LP3E.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta:Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.) 2007. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 1983. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku kepemimpinan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Sumodiningrat, Gunawan 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Sunyoto, Usman. (2004). *Pembangunandan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susilo, Martoyo. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahjosumidjo. 1984. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Abdulsani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adimihardja.1999. *Dinamika Budaya Lokal*. Bandung: LP3IS.
- Ali, Madekhan. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Yogyakarta: Averroes Press
- Almasdi dan Jusuf Suit. 2012. *Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen Sumber. Daya Manusia*. Jakarta: Syiar Media.

- Bryant, C. Dan White, Louis G. 1989. *Manajemen Pembangunan*. Alih Bahasa: Budiman N. Editor. Jakarta LP3ES.
- Friedman, John. 1997. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*. Alih Bahasa: Agus Dharma Jakarta: PT. Pustaka LP3E.
- Kartono dan Kartini. 1981. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Koentjaraningrat. 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Surabaya: Aksara Baru.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Korten. 1998. *The Empowerment Manual*. London: Grower Publishing Company.
- Ndraha, Taliziduhi. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Rivai, Veithzal. 2007. *Bank And Financial Institute Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ 2007. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Panji. 2009. *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Jakarta: Rafika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 1983. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Kepemimpinan*. Jakarta: Gunung Agung.

Sumber lain :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.